

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)**

*Criminal Liability Performed By The Corporation For Environmental Damage
As A Result Of Forest And Land Fire (Case Study Number
59/Pid.B/Lh/2020/Pn.Rgt)*

TEUKU AZHARI

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Tlp. 021-7656971
E-mail : antopurwanto483@ gmail.com.

ABSTRAK

Proses deforestasi yang terjadi di Riau sangat mengkhawatirkan, di tambah dengan sering sekali terjadinya kebakaran hutan dan lahan menjadi bukti bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan saat ini berjalan tidak baik. Atas data dan fakta kebakaran hutan dan lahan yang sering kali terjadi terbukti melibatkan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penanaman dan pemanfaatan hasil hutan. Untuk itu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana karena UUPPLH No. 32 Tahun 2009 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Upaya untuk meminta pertanggungjawaban korporasi tidak mudah banyak kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi berhenti proses penyidikannya karena tidak memiliki cukup bukti. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui seperti apa kriteria korporasi yang dikatakan melakukan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan, mengenai kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan apabila memenuhi unsur-unsur dalam penyusunan pasal-pasal kebakaran hutan dan lahan yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar dan melebihi baku mutu lingkungan. pelanggaran itu dilakukan oleh seseorang karena alasan pekerjaan atau hubungan lain. dalam ruang lingkup badan usaha. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama suatu badan usaha, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan bersifat pendahuluan, karena kesalahan terletak pada pengurus korporasi (direksi) yang menjadi dalang atau pemilik kendali kegiatan operasional korporasi (*Director Mind*). karena dalam PP No 4 Tahun 2001 Pasal 13 bahwa direksi sebagai penanggung jawab semua kegiatan komersial yang usahanya dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan harus mematuhi peraturan pemerintah No. kebakaran hutan dan lahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan dan Lahan

ABSTRACT

The deforestation process that occurs in Riau is very worrying, coupled with the frequent occurrence of forest and land fires, it is evidence that the management and utilization of the environment is currently running well. The data and facts of forest and land fires that often occur are proven to involve companies engaged in planting and utilizing forest products. For this reason, the corporation must be criminally responsible because UUPPLH no. 32 of 2009 has recognized corporations as subjects of criminal law. Efforts to hold corporations accountable are not easy. Many cases of forest and land fires involving corporations stop their investigations because they do not have enough evidence. Therefore, the author wants to know what the criteria for corporations are said to be committing criminal acts related to environmental protection and management with frequent occurrence of forest and land fires caused by corporate activities, and how the form of criminal liability is. This research method uses the normative legal method and the statute approach, namely the approach through legislation. The results of the investigation, regarding the criteria for a corporation to commit a forest and land fire crime if it meets the elements in the preparation of the articles on forest and land fires, namely land clearing by burning and exceeding environmental quality standards. the violation is committed by a person for reasons of employment or other relationships. within the scope of the business entity. If the criminal act is committed by, for, or on behalf of a business entity, then the act is considered as a corporate act. The form of corporate criminal liability in the crime of forest and land fires is preliminary, because the fault lies with the corporate management (directors) who are the mastermind or owner of the control of the corporation's operational activities (Director Mind). because in PP No. 4 of 2001 Article 13 that the board of directors as the person in charge of all commercial activities whose business can cause damage and environmental pollution must comply with government regulation no. forest and land fires.

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Crime, Forest and Land Fires